

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jakarta merupakan pusat kota di Indonesia yang memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis yang berarti memiliki ciri curah hujan yang tinggi apalagi pada musim penghujan. Akibat musim penghujan yang panjang atau intensitas hujan yang tinggi dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Jakarta juga merupakan kota dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Begitu banyak permasalahan yang ada di Jakarta seperti tingkat kriminalitas yang tinggi, kemacetan yang begitu parah, kualitas air bersih yang rendah dan yang tidak asing selalu menghampiri disetiap musim penghujan yaitu bencana banjir. Sampai saat ini bencana banjir masih kerap menyerang Jakarta.

Kondisi daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan banyak mengalami berbagai bencana alam yang disebabkan dari faktor alam maupun non alam ataupun faktor manusia. Penanggulangan banjir yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan koordinasi dari berbagai pihak baik dari dinas yang terkait dan juga kerjasama dari masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang efektif maka pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan penanggulangan tersebut.

Berdasarkan pembukaan Undang - Undang 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Makna dari pernyataan tersebut bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut ancaman resiko termasuk dampak bencana. Perlindungan atas dasar hak-hak ini menjadikan suatu kewajiban pemerintah untuk mewujudkan dalam bentuk program-program yang sesuai dengan pernyataan tersebut.

Sejalan dengan konstitusi di atas maka suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat pada

suatu lingkup manajemen bencana yang efektif dan efisien khususnya dalam penanggulangan bencana banjir, hal ini memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi semua pihak harus aktif berperan termasuk masyarakat juga berpartisipasi dalam penanganan bencana banjir.

Terselenggaranya pemerintah yang baik menjadi harapan bagi seluruh masyarakat maupun instansi pemerintah di Indonesia, dalam melaksanakan fungsi pelayanan oleh aparatur pemerintahan, kinerja merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dan telah disepakati bersama. Dalam kinerja dibutuhkan manajemen yang baik, manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi tetapi juga bagi individu, manfaat kinerja bagi organisasi adalah dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan.

Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan sebagai kinerja atau performa organisasi. Kinerja dalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia, baik unsur pimpinan maupun pekerja. Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan dan merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja.

Terkait dengan penanggulangan bencana, Presiden republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang untuk menanggulangi bencana banjir di Indonesia. Perintah tersebut dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor bahwa dalam Instruksi Presiden tersebut dikatakan bahwa untuk penanggulangan banjir dan tanah longsor di wilayah Republik Indonesia, mulai dari status siaga darurat hingga transisi darurat ke pemulihan dan pasca sarjana, agar instansi terkait untuk menyiapkan rencana kontijensi penanggulangan banjir dan tanah longsor, pencegahan terjadinya banjir dan tanah longsor, pengendalian banjir dan tanah longsor, serta penanggulangan pasca bencana banjir.

Pemerintah membuat Undang-Undang penanggulangan bencana yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

penanggulangan bencana. Undang-Undang atau peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Sesuai dengan pasal 18 UU Nomor 24 Tahun 2007 lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tugas pokok sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing dalam penyerahan bantuan saat bencana, seperti pemberian logistik untuk pangan serta mendirikan posko tanggap bencana dan memberi perlindungan kepada masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Bencana banjir dapat ditangani dengan baik dan cepat, hal tersebut sangat membutuhkan kinerja yang baik dari BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari acaman bencana, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, membangun partisipasi dan kemitraan publik atau swasta, mendorong semangat gotong royong.

Berdasarkan data kejadian bencana BPBD Provinsi DKI Jakarta terdapat 6 jenis bencana alam yang pernah terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, seperti banjir, kebakaran, pohon tumbang, tanah longsor, angin kencang dan konflik sosial. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Kejadian bencana yang sering terjadi pada tahun 2019-2021 adalah bencana banjir, berikut kejadian bencana banjir menurut catatan BPBD Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1.1.
Kejadian Bencana Banjir Tahun 2019 – 2021

No	Wilayah	2019				2020				2021			
		Jumlah Terdampak			Ketinggian air rata-rata	Jumlah Terdampak			Ketinggian air rata-rata	Jumlah Terdampak			Ketinggian air rata-rata
		Kec	Kel	RW		Kec	Kel	RW		Kec	Kel	RW	
1	Jakarta Pusat	1	1	1	20 cm	8	26	83	10 cm s/d 150 cm	2	4	7	40 cm s/d 80 cm
2	Jakarta Utara	6	19	51	3 cm s/d 50 cm	6	23	133	5 cm s/d 150 cm	6	15	29	10 cm s/d 80 cm
3	Jakarta Barat	7	23	90	3 cm s/d 110 cm	8	41	220	5 cm s/d 200 cm	5	21	58	5 cm s/d 100 cm
4	Jakarta Selatan	8	25	46	10 cm s/d 100 cm	10	60	235	5 cm s/d 200 cm	11	45	108	20 cm s/d 270 cm
5	Jakarta Timur	7	19	64	5 cm s/d 250 cm	10	62	347	5 cm s/d 350 cm	8	33	97	10 cm s/d 300 cm
6	Kepulauan Seribu	0	0	0	0	2	6	21	5 cm s/d 50 cm	2	2	7	40 cm s/d 50 cm
Jumlah		29	87	252	3 cm s/d 250 cm	44	212	1039	5 cm s/d 350 cm	34	120	306	5 cm s/d 300 cm

Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menunjukkan lokasi dan jumlah kejadian bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta mulai tahun 2019-2021. Kejadian banjir yang tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan total terdampak adalah 44 Kecamatan, 212 Kelurahan dan 1039 RW, dengan ketinggian air rata-rata 5 cm s/d 350 cm. dominan kelas tertinggi mengalami bencana banjir terjadi di wilayah Jakarta Timur Kelurahan Kampung Melayu, karena dari sisi geografis Kampung Melayu mempunyai kemiringan tanah drastis berdekatan dengan kali ciliwung yang cukup dangkal dan berada di dekat dengan permukiman warga padat penduduk sehingga jika terjadi curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, terlebih lagi kali tidak mampu menampung debit air yang tinggi.

Di Jakarta bagian Timur curah hujan tercatat mencapai 193ml. kemudian memiliki masalah banjir diberbagai titik dan setiap tahun tidak bisa dihindari oleh daerah tersebut. Khususnya daerah Kelurahan Kampung Melayu mempunyai masalah banjir, karena dilewati arus sungai yang melalui daerah tersebut kemudian saat hujan datang selalu terjadi banjir. Kelurahan Kampung Melayu memiliki luas 47,83 Ha. Kelurahan ini terdiri atas 114 Rukun Tetangga dan 8 Rukun Warga. Kampung melayu termasuk wilayah rawan banjir karena terletak di tepi kali Ciliwung. Untuk daerah pengaliran sungai dengan kepadatan penduduk tertinggi air permukaan dan air tanah telah mencapai titik kritis maksimum. Banjir di Jakarta sebagian besar bisa dikaitkan dengan kehadiran curah hujan yang tinggi maupun kejadian hujan terus menerus baik di Jakarta sendiri (daerah Hilir) atau di daerah hulu yang memiliki dataran yang lebih tinggi seperti Depok dan Bogor.

Data hasil laporan terdampak banjir tahun 2020 di wilayah Kelurahan Kampung Melayu Provinsi DKI Jakarta oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

Gambar 1.2.

Rekapitulasi Korban Terdampak Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Terdampak				Ketinggian air	Tanggal Kejadian	Jumlah Pengungsi (Tertinggi)	Tempat Pengungsian
		RW	RT	KK	Jiwa				
1	Januari	8	30	802	2556	10 / 350 cm	1, 9, 18	1.778	8
2	Februari	6	29	392	2185	10 / 150 cm	6, 8, 16, 20, 23,	858	5
3	Maret	4	25	326	1068	25 / 110 cm	1, 2, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 28,	186	3
4	April	4	18	428	817	10 / 70 cm	1, 8, 19	-	-
5	Mei	5	27	392	1214	10 / 180 cm	18, 19, 21	61	3
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	4	18	248	897	10 / 75 cm	22	-	-
10	Oktober	5	27	326	1068	10 / 150 cm	05,11,25,29	-	-
11	November	4	16	-	-	10 / 20 cm	1 dan 12	-	-
12	Desember	4	18	248	817	10 / 80 cm	6 dan 7	-	-
Jumlah		40	208	3162	10622	10 / 350 cm		2.883	19

Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta

Tabel di atas menunjukkan terdapat jumlah pengungsi tertinggi dengan jumlah 1.778 jiwa di bulan Januari 2020 akibat bencana banjir dan ketinggian air tertinggi 10 cm / 350 cm. Pemerintah harus melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat pada suatu lingkup manajemen bencana yang efektif dan efisien, khususnya dalam penanggulangan bencana pada saat banjir.

Peristiwa bencana memiliki dampak begitu besar yang terjadi dimanapun. Kejadian tersebut bukan tanpa alasan karena bencana terdiri dari bencana sosial dan bencana alam. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak.

Salah satu yang menjadi persoalan dalam penanggulangan bencana adalah mengenai pendataan dalam pembagian logistik di daerah bencana, komunikasi dan kelancaran arus, komunikasi atau sarana dan prasarana. Pengelolaan informasi yang baik dibutuhkan dalam usaha penanganan bencana yang efektif dan efisien. Seperti untuk memprediksi adanya bencana maka dibutuhkan data geografis suatu daerah atau ketika dideteksi akan terjadinya bencana maka dibutuhkan sarana untuk menyebarkan informasi ke masyarakat dalam waktu yang cepat. Demikian juga dalam menolong korban bencana dibutuhkan pertukaran informasi antara petugas dilapangan dengan pusat penanganan bencana dilakukan untuk mengetahui keadaan di area bencana dan bantuan apa saja yang dibutuhkan. Informasi yang ada sedapat mungkin harus tersedia dengan cepat, tepat dan akurat serta dapat diakses dengan siapa saja, karena itu dibutuhkan sistem informasi dalam penanggulangan bencana.

Setelah melakukan observasi secara tidak langsung dan wawancara pra riset pada bulan Agustus – Desember 2022 dengan Staff BPBD Provinsi DKI Jakarta ditemukan adanya beberapa indikasi yang menjadi hambatan atau kendala Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan kinerja BPBD dalam penanggulangan saat bencana banjir antara lain:

Pertama karena timbulnya keresahan masyarakat pada media sosial, narasi-narasi penulisan yang sudah tersebar pada publik menjadi salah satu indikator belum optimalnya kinerja BPBD dalam melakukan penanganan pada saat banjir terkait penyaluran logistik yang ditayangkan melalui media youtube oleh Official iNews <https://youtu.be/fFRYOVTIwo>. Dan media youtube oleh KOMPASTV <https://www.youtube.com/watch?v=Y3S59uQUiwA> yang menyatakan bahwa kebutuhan logistik kurang maksimal dalam penyalurannya agak terlambat.

Kedua beberapa aspek yang mempengaruhi optimalisasi kinerja BPBD diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dalam proses penanganan pada saat banjir, yang kita ketahui bahwa pelaksanaan penanganan banjir memerlukan banyak tenaga untuk bekerja maksimal secara tepat dan tanggap untuk meminimalisir kerugian baik harta hingga nyawa, oleh karena itu kurangnya

pegawai BPBD yang handal akan berdampak pada kualitas pelayanan penanggulangan bencana saat banjir di Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga masalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, sampai dengan hambatan-hambatan sosial pada masyarakat perlu diperhatikan karena akan berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas kerja dari BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka penyelenggaraan penanganan bencana banjir belum optimal dilakukan. Selain itu BPBD Provinsi DKI Jakarta kekurangan orang yang kompeten dibidangnya hal ini dikarenakan BPBD memberikan pelayanan 24 jam nonstop kepada masyarakat, dalam rasio jumlah sumber daya manusia hal ini membuat pelayanan yang diberikan kurang efisien, kurang efektif, dan kurang cepat tanggap.

Keempat tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kedaruratan bencana masih rendah karena masih terdapat warga yang membuang sampah sembarangan yang menjadi salah satunya mengakibatkan terjadi banjir.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Kinerja BPBD dalam penanganan saat bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penanganan bencana banjir.
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan bencana banjir

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian perlu dilakukan pembatasan masalah agar hasil penelitian lebih terarah dan lebih fokus pada pokok permasalahan yang diangkat. Membatasi ruang lingkup permasalahan ini pada kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan saat bencana banjir di Kelurahan Kampung Melayu.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan saat bencana banjir di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah maka adapun tujuan penelitian adalah yaitu:

1. Untuk mengetahui Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan saat bencana banjir di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan saat bencana banjir di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan tentang kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi bencana banjir di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan memberikan kontribusi bagi instansi yang bersangkutan untuk dijadikan bahan referensi dalam mengkaji masalah-masalah terkait bencana banjir.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penyusun berharap agar penelitian ini dapat memberikan pengkajian kinerja BPBD. Dan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam penanggulangan resiko bencana banjir, khususnya bagi pemerintah daerah dalam hal ini, hasil penelitian ini dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta.